

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA (Suatu Studi di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)

Dui Andayani Lamber¹

Ronny Gosal²

Stefanus Sampe³

Abstrak

Kepemimpinan pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa sepatutnya mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara maka kepemimpinan ini pula diharapkan mampu menghadirkan perangkat desa yang profesional, jujur dan adil dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa. Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang adalah Desa di gugusan kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki karakteristik kawasan berbenteng garis pantai, dalam pelaksanaan pembangunan kawasan wilayah pesisir belumlah berkembang sehingga perlu bantuan program sehingga bias menjadi urat nadi dan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kepulauan Talaud, secara faktual tujuan dari pembangunan di wilayah pesisir adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang diharapkan memberi keuntungan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Secara fisik pembangunan wilayah pesisir harus menjadi kawasan investasi yang mampu menggerakkan perubahan social dan ekonomi.

Kata Kunci : Efektivitas Program, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Masyarakat Desa Kuma Selatan selama ini mengelolah wilayah pesisir ternyata penghasilannya belum seperti yang diharapkan karena belum memanfaatkan secara maksimal potensi wilayah pesisir. Masyarakat Desa Kuma Selatan masih focus pada pengelolaan perikanan laut secara tradisional dan belum mengelolah potensi lainnya seperti memanfaatkan potensi wisata laut, perikanan tambak apung (jarring), pengelolaan rumput laut atau pembuatan cinderamata dari kerang-kerang atau membuka rumah makan ikan bakar dan lain-lain. Mata pencaharian sebagai nelayan ada waktunya panen yang melimpah tetapi ada juga masanya para nelayan harus istirahat melaut karena musim barat ataupun musim angin selatan sehingga mereka harus mencari pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tidak melaut.

Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang adalah Desa di gugusan kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki karakteristik kawasan berbenteng garis pantai, dalam pelaksanaan pembangunan kawasan wilayah pesisir belumlah berkembang sehingga perlu bantuan program sehingga bias menjadi urat nadi dan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kepulauan Talaud, secara faktual tujuan dari pembangunan di wilayah pesisir adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang diharapkan memberi keuntungan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Secara fisik pembangunan wilayah pesisir harus menjadi kawasan investasi yang mampu menggerakkan perubahan social dan ekonomi.

Potensi laut dan perikanan Desa Kuma Selatan sangat besar. Sayangnya,

pemberdayaan sektor perikanan belum optimal, sehingga belum menghasilkan produktivitas yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Desa Kuma Selatan. Program pemerintah yang telah berjalan sejak awal tahun 2016 itu masi belum menyentuh seluru masyarakat desa. Beberapa dari masyarakat desa telah mendapatkan bantuan alat-alat nelayan untuk penangkapan ikan berupa perahu, mesin, jaring, dan lain-lain. Tetapi ada beberapa kendala yang menjadi masalah bagi para nelayan diantaranya tidak adanya perusahaan penampungan ikan untuk mengelolah hasil tangkapan dari para nelayan, kurangnya alat transportasi untuk membantu masyarakat nelayan dalam mengekspor hasil tangkapan, sehingga banyak hasil tangkapan dari para nelayan hanya disimpan dipenyimpangan ikan dirumahnya dan tidak dipasarkan.

Selain itu masalah listrik juga menjadi suatu masalah dari para nelayan karna kualitas listrik yang belum terlalu baik, sehingga selalu terjadinya pemadaman listrik sehingga membuat banyak ikan menjadi rusak dan tidak dapat di konsumsi lagi. Sehingga hal-hal itu lah yang menjadi masalah dari perekonomian masyarakat desa tidak dapat meningkat dengan baik. Selain itu keterbatasan pengetahuan dari sebagian masyarakat yang belum tau mengoperasikan mesin, sehingga tidak dapat melaut karena tidak bisa menghidupkan mesin atau ketika mesin mengalami gangguan atau kerusakan. Kurangnya bahan bakar juga merupakan satu kendala bagi para nelayan untuk melaut.

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang pengaturan bekerja di bidang perikanan (The Work in Fishing Convention) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya di bandingkan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan seperti ilegal, unreported, and unregulated fishing dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini, khususnya tentang efektifitas pengelolaan wilayah pesisir. Menurut Sugiarto (1976), wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami, yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang di sebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Sedangkan Menurut Beattley, et al. Dalam bukunya La Sara (2014: 11) menjelaskan wilayah pesisir adalah wilayah dinamik yang saling

berhubungan dimana daratan air dan udara berinteraksi dalam keseimbangan yang mudah terganggu (Fragile) yang secara tetap di rubah oleh pengaruh alam dan manusia. Secara umum, wilayah pesisir sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentang. Kerentanan tersebut di pengaruhi karena kawasan pesisir dan laut memiliki karakteristik khusus, baik dalam sifat ekologis maupun keanekaragaman sehingga perlunya mendapatkan perhatian khusus.

Definisi wilayah pesisir seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun dilaut, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling muda terkena dampak kegiatan manusia. Menurut kesepakatan internasional bahwa wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antar laut dan daratan kearah darat mencakup daerah yang terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan kearah laut meliputi daerah paparan benua (*kontinental shelf*) (Beatley 1994), sedangkan batas kearah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri).

Metode Penelitian

Penelitian ini di desain sebagai suatu penelitian kualitatif Bogman dan Taylor (Dalam Meleong 2006) menyatakan bahwa :Penelitian kualitatif adalah

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

(Maleong 2006) dengan mendasari pada definisi atau padangan para ahli menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami femone yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain) secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamia dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif karena permasalahan yang kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga penelitian di sesuaikan dengan tujuan awal yakni mendapatkan data dengan cara menginterpretasikan kata-kata sehingga dapat diperoleh gambaran yang mendalam tentang Efektivitas Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Kab. Kep. Talaud.

Hasil Penelitian

Sebagai mana telah di sebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa, di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Menurut UU Nomor. 22 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal 3 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perasaskan :

- a. Keberlanjutan
- b. Konsistensi
- c. Keterpaduan
- d. Kepasiran Hukum
- e. Kemitraan

Pasal 4 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di laksanakan dengan tujuan:

- a. Melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk itu dalam pelaksanaan program yang telah di buat oleh pemerintah dalam mengembangkan dan mengelolah sumberdaya yang ada di wilayah pesisir perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak baik dari sesame aparatur desa maupun dari kalangan masyarakat. Sehingga untuk mengetahui sampai sejauh mana program ini telah terlaksanakan dengan baik atau tidak, maka di lakukan wawancara terhadap 9 informan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Ketua Adat
3. 7 Orang Masyarakat

Kesimpulan

Berhasil uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah di tarik kesimpulan bahwa peran kepemimpinan kepala desa dan para aparatur- aparatur desa dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat akan di katakan berhasil apabila masyarakat puas dengan hasil kerja yang di lakukan oleh pemerintah. Program pengelolaan wilayah pesisir ini di lakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah pesisir dan dapat memanfaatkan hasil laut dengan maksimal.

Efektivitas sebuah program akan terukur dan dapat dikatakan berhasil apabila program yang dilaksanakan dapat meningkatkan keadaan perekonomian masyarakat. Bantuan berupa alat nelayan perahu dan mesin untuk para kelompok nelayan yang diberikan pemerintah sudah dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan dapat membantu peningkatan pendapatan, masyarakat dalam setiap harinya, berkat penjualan ikan dan hasil tangkapan setelah mereka melaut. Sehingga mereka juga dapat meningkatkan perekonomian didalam keluarga mereka.

Dari situlah dapat di ketahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan program pengelolaan wilayah pesisir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di desa kuma selatan pemerintah telah berhasil membuat masyarakat berpenghasilan meskipun tidak tetap tetapi sudah dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian.

Saran

Kepala Desa beserta perangkat Desa hendaknya terus melakukan program-program untuk masyarakat desa yang dapat membantu pendapatan masyarakat, agar masyarakat tidak menganggur dan mendapatkan pekerjaan. Kepala Desa dan perangkat Desa juga harus lebih mempererat lagi komunikasi dan hubungan dengan warga desa kuma selatan, agar keterbukaan dan saling membantu dalam pelaksanaan program yang ada di Desa dapat terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cincin-Sain dan Knecht. 1998. *integrated coastal and ocean management concepts and practices, island press*, Washington DC.
- Dahuri, Rokhmin. 2008. *Sumber daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu*. Jakarta:PT Pradnya Paramita.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2002. *Pedoman umum penata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Departemen kelautan dan perikanan.*,DKP,Jakarta.
- Imron. 2003. *Pemberdayaan masyarakat nelayan, Universitas Negeri Jember, Jember*.
- Muhammad, I, 2009. *Metode penelitian ilmu sosial*, LKIS, Yogyakarta.
- Naamin, A, dan A, Harja Mulia. 1990. *Potensi pemanfaatan, dan pengelolaan sumberdaya perikanan*, Humaniora, Bandung.
- Nasution. 2002. *Metode Reserch penelittian ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Pameroy. 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

EKSEKUTIF ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 3 No. 3 Tahun 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

- Ponggo, D,1991. *Karakteristik pengelolaan hutan berbasis masyarakat*. LIP. Jakarta
- Ponggo, D,. 2005.*Pedoman Umum PEMP. Direktorat Jenderal Pesisir dan pulau-pulau kecil*, Departemen kelautan dan perikanan. Jakarta
- Sugiarto. 1976. *Pedoman umum pengelolaan wilayah pesisir*, lembaga oceanology Nasional Jakarta.
- United Nations. 1982. *United Nations Convention on The Law of The Sea. UNCLOS* .: H Umora. Bandung.
- Bappenas. 2004. *Tatacara Pembangunan Kawasan. Direktorat pembangunan kawasan khusus dan tertinggal*, gramedia, Jakarta.
- ILO. 2007. *Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor. 188 Tahun 2007, Tentang Work in Fishing*.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.